

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. (2004). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Jakarta.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*, Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akutansi Pemerintah*, Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah*, Jakarta
- Arens, A.A., Elder,R,J., & Beasley,M,S. (2017), *Auditing and Assurance Service*, Edisi 16, Pearson.
- Bawono, I.R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Provinsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S.M. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hendriyani, R & Tahar, A. (2015). “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22 No. 1, hlm. 25-33.
- Hilmi, A.Z. & Martani, D. (2012). “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi”.
- Khasanah, N. L. & Rahardjo, S. N. (2014). “Pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3 No. 3, hlm. 1-11.

- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*, Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martani, D., & Lestiani, A. (2012). "Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia". *Global Review of Accounting and Finance*, Vol. 3.No. 1. March 2012, page. 67-84.
- Maulana, C. & Handayani, B. D. (2015). "Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD". *Accounting Analysis Journal 4 (4)*, ISSN 2252-6765, hlm. 1-11.
- Nordiawan, D., Putra, I.S., & Rahmawati, M., (2007). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, W. A., & Austin, K. (1986). "Disclosure quality in governmental financial reports: an assessment of the appropriateness of compound measure". *Journal of Accounting Research*, Vol. 24, No. 2 (Autumn, 1986), page. 412-421.
- Setyaningrum, D. & Syafitri, F. (2012). "Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No. 2, Desember 2012,
- Suhardjanto, D. & Yulianingtyas, R.R. (2011). "Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah: studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 1, November 2011, hlm. 30-42.
- Suwardjono. (2010). *Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan*, edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). "Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia". *Accounting Analysis Journa 4 (2)*, ISSN 2252-6765